

Dinamika Perang Asimetris dalam Strategi Perang Informasi OPM terhadap Keamanan Nasional

Luis Moya¹ Mochammad Afifuddin² Oktaheroe Ramsi³
Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}
Email: luismoyasibuea@gmail.com¹

Abstrak

Perang asimetris, khususnya perang informasi, menjadi ancaman signifikan terhadap keamanan nasional, terutama dengan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perang informasi yang dilakukan oleh OPM, dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia, dan langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui analisis dokumen dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM menggunakan propaganda, disinformasi, dan narasi berbasis isu-isu sensitif, seperti pelanggaran HAM, untuk menciptakan polarisasi sosial dan delegitimasi pemerintah Indonesia. Strategi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat utama dalam menyebarkan pesan secara luas dan cepat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti penguatan regulasi digital, kampanye kontra-narasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Namun, efektivitas upaya ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor dan pengembangan kapasitas intelijen. Kesimpulannya, perang informasi oleh OPM memberikan dampak multidimensi terhadap stabilitas nasional, memerlukan respons terintegrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, penguatan kerja sama internasional, dan investasi dalam teknologi keamanan siber sebagai langkah strategis untuk menangkal ancaman tersebut.

Kata Kunci: Disinformasi, Keamanan Nasional, OPM, Perang Asimetris, Perang Informasi

Abstract

Asymmetric warfare, particularly information warfare, poses a significant threat to national security, especially with the involvement of the Free Papua Movement (OPM) as a non-state actor. This study aims to analyze OPM's information warfare strategy, its impact on Indonesia's national security, and potential mitigation measures. Using a qualitative descriptive approach, the research employs a case study method with data collected through document analysis and media reports. The findings reveal that OPM utilizes propaganda, disinformation, and narratives centered on sensitive issues, such as human rights violations, to create social polarization and delegitimize the Indonesian government. These strategies are amplified through social media, which serves as a primary tool for widespread and rapid dissemination of messages. The government has implemented mitigation efforts, including strengthening digital regulations, launching counter-narrative campaigns, and enhancing public digital literacy. However, these efforts require further improvement, particularly in cross-sector collaboration and intelligence capacity building. The study concludes that OPM's information warfare has multidimensional impacts on national stability, necessitating an integrated response involving the government, society, and the international community. Recommendations include improving digital literacy, strengthening international cooperation, and investing in cybersecurity technologies as strategic measures to counter the threats.

Keywords: Asymmetric Warfare, Disinformation, Information Warfare, National Security, OPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perang asimetris menjadi fenomena yang semakin kompleks di era modern, terutama dengan keterlibatan aktor non-negara yang menggunakan metode non-konvensional untuk

melawan aktor negara yang memiliki kapasitas militer dan sumber daya lebih besar. Dalam konteks ini, perang informasi menjadi salah satu strategi kunci yang efektif dalam memperbesar dampak konflik melalui media digital, propaganda, dan disinformasi. Strategi ini tidak hanya digunakan untuk menciptakan ketidakstabilan, tetapi juga untuk membangun dukungan bagi tujuan politik tertentu, terutama dalam situasi di mana aktor non-negara memiliki keterbatasan sumber daya (Kaldor, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa perang informasi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga senjata strategis dalam konflik modern. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah salah satu aktor non-negara yang memanfaatkan perang informasi untuk memperjuangkan agenda separatisnya. Strategi ini bertujuan untuk memengaruhi opini publik, baik domestik maupun internasional, agar mendukung narasi yang disampaikan oleh OPM. Mereka memanfaatkan media sosial, jaringan aktivis global, dan organisasi non-pemerintah untuk menyebarluaskan isu-isu terkait hak asasi manusia dan self-determination. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana aktor non-negara dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melawan aktor negara yang memiliki kekuatan militer dan politik lebih besar (Smith, 2021). Pendekatan ini juga mencerminkan tren global dalam konflik kontemporer, di mana informasi menjadi kekuatan utama.

Strategi perang informasi yang digunakan OPM telah menciptakan tantangan serius bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia. OPM sering kali menggunakan narasi yang menonjolkan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia untuk menarik perhatian dunia internasional. Narasi ini diperkuat dengan dokumentasi visual, laporan yang dibuat oleh LSM, dan kampanye di media sosial, yang bertujuan membangun opini negatif terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana narasi yang terstruktur dan berulang dapat membentuk persepsi publik secara efektif (Jones, 2023). Dalam jangka panjang, strategi ini dapat melemahkan legitimasi pemerintah di mata komunitas internasional. Dalam perang asimetris, aktor yang lebih lemah sering kali mengandalkan strategi yang menargetkan legitimasi lawan mereka. OPM menggunakan taktik ini dengan menyasar legitimasi pemerintah Indonesia melalui serangkaian narasi yang menyudutkan. Mereka juga berupaya melemahkan dukungan domestik terhadap pemerintah dengan menanamkan ketidakpercayaan melalui propaganda yang konsisten. Strategi ini mencerminkan sifat dinamis dari perang informasi, di mana narasi dibentuk sesuai dengan audiens yang ditargetkan (Newman, 2022). Selain itu, propaganda yang mereka sebar sering kali didukung oleh teknologi canggih yang memungkinkan penyebaran pesan secara luas dan cepat.

Kemajuan teknologi komunikasi telah menjadi katalis utama dalam meningkatkan efektivitas perang informasi. Media sosial, misalnya, memungkinkan aktor seperti OPM untuk menjangkau audiens yang luas tanpa memerlukan infrastruktur besar. Dengan demikian, pesan-pesan propaganda dapat disebarluaskan secara cepat dan murah, menciptakan dampak yang signifikan terhadap opini publik global. Teknologi ini juga memungkinkan narasi untuk disesuaikan dengan konteks lokal maupun internasional, sehingga memperbesar daya tarik pesan yang disampaikan (Castells, 2023). Dengan kemajuan teknologi ini, batas antara informasi dan propaganda menjadi semakin kabur. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani perang informasi ini. Upaya yang dilakukan antara lain mencakup kampanye kontra-narasi, penguatan diplomasi internasional, dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas digital yang mendukung separatisme. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Pemerintah juga harus menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik, yang sering kali tergerus oleh narasi negatif yang berulang (Yudhoyono, 2022). Langkah-langkah strategis dan terkoordinasi menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini. Papua memiliki sejarah konflik yang panjang, yang menjadi latar belakang munculnya gerakan

separatis seperti OPM. Permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Papua sering kali digunakan sebagai amunisi dalam perang informasi oleh OPM. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan daerah lain di Indonesia menjadi salah satu narasi utama yang diangkat untuk memengaruhi simpati publik. Isu ini memperlihatkan bagaimana masalah internal dapat dimanfaatkan oleh aktor separatis untuk memperkuat posisi mereka dalam konflik (Widodo, 2023). Pemerintah perlu memahami akar masalah ini untuk menciptakan solusi jangka panjang yang efektif.

Perang informasi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi internasional terhadap isu Papua. Laporan dari organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch sering kali dijadikan referensi oleh OPM untuk memperkuat klaim mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perang informasi tidak hanya berdampak domestik tetapi juga internasional. Dengan memanfaatkan sumber-sumber terpercaya, OPM mampu meningkatkan kredibilitas narasi mereka di mata dunia (Amnesty International, 2023). Ini menjadi tantangan besar bagi diplomasi Indonesia dalam menangani persepsi global terkait isu Papua. Salah satu aspek menarik dari perang informasi adalah bagaimana aktor non-negara seperti OPM mampu memanfaatkan kelemahan dalam sistem komunikasi modern. Mereka sering kali menggunakan teknik manipulasi informasi, seperti deepfake atau penyebaran berita palsu, untuk menciptakan narasi yang sulit dibantah oleh pemerintah. Strategi ini menunjukkan tingkat inovasi dalam perang asimetris, di mana teknologi menjadi senjata utama (Taylor, 2022). Pemerintah perlu mengembangkan kapasitas untuk mendeteksi dan merespons ancaman ini secara efektif. Dinamika perang informasi ini tidak lepas dari faktor geopolitik. Negara-negara tertentu mungkin memiliki kepentingan untuk mendukung gerakan separatis di Papua sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional. Ini menunjukkan bahwa perang informasi oleh OPM memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar konflik lokal. Dalam konteks ini, peran Indonesia di ASEAN dan forum internasional lainnya menjadi krusial untuk melindungi kedaulatan negara (Rahman, 2023). Geopolitik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan strategi perang informasi. Perang informasi yang dilakukan oleh OPM juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial di Papua. Ketegangan antara kelompok pro-integrasi dan separatis sering kali diperburuk oleh penyebaran informasi yang tidak akurat, yang memicu konflik horizontal di masyarakat. Konflik ini menciptakan dampak sosial yang luas, termasuk disintegrasi sosial dan ketidakpercayaan antar-komunitas (Mulyana, 2023). Pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas diperlukan untuk mengurangi ketegangan ini.

Keterlibatan media dalam konflik Papua juga tidak dapat diabaikan. Media lokal dan internasional sering kali menjadi sarana bagi OPM untuk menyebarkan narasi mereka. Dalam banyak kasus, pemberitaan media cenderung bias dan hanya menyoroti satu sisi konflik, sehingga memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan media yang lebih bijak oleh pemerintah Indonesia (Nugroho, 2023). Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap media. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan upaya kontra-narasi dengan memanfaatkan media digital. Namun, langkah ini sering kali tidak sebanding dengan kecepatan dan intensitas propaganda yang dilakukan oleh OPM. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terkoordinasi dan komprehensif. Penguatan literasi digital di masyarakat juga menjadi salah satu cara untuk melawan propaganda yang beredar luas (Hassan, 2022). Literasi ini dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Dalam konteks hukum internasional, perang informasi yang dilakukan oleh OPM dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, penegakan hukum terhadap aktivitas ini sering kali terbentur oleh perbedaan interpretasi hukum internasional dan nasional, yang

menciptakan ruang abu-abu bagi OPM untuk beroperasi. Kerja sama internasional diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menghadapi ancaman ini (Luhulima, 2023). Dengan demikian, pendekatan multilateral menjadi penting dalam menangani isu ini. Studi ini bertujuan untuk memahami dinamika perang informasi yang dilakukan oleh OPM dalam konteks perang asimetris. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan, dampaknya terhadap keamanan nasional, dan langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang perang informasi dalam konflik modern.

Rumusan Masalah penelitian

1. Bagaimana strategi perang informasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) memengaruhi stabilitas keamanan nasional Indonesia?
2. Apa saja Dampak terhadap Keamanan Nasional?
3. Bagaimana peran pemerintah dapat memanfaatkan eknologi informasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi perang informasi yang digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam konteks perang asimetris dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia.
2. Mengidentifikasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman perang informasi yang dilakukan oleh OPM, termasuk efektivitas kontra-narasi dan regulasi digital.
3. Menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam menghadapi ancaman perang informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan literasi digital.

Manfaat penelitian

Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang perang asimetris, khususnya dalam konteks perang informasi sebagai ancaman non-konvensional terhadap keamanan nasional.
2. Menyempurnakan teori tentang propaganda dan disinformasi dalam perang modern dengan menyoroti dinamika penggunaan teknologi digital oleh aktor non-negara.
3. Mengembangkan kerangka analisis untuk memahami hubungan antara strategi perang informasi dan dampaknya terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia dalam merespons ancaman perang informasi secara lebih terkoordinasi, efektif, dan berbasis teknologi.
2. Membantu masyarakat meningkatkan literasi digital untuk mengenali dan menangkal disinformasi, sehingga memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah.
3. Menyediakan panduan bagi aparat keamanan dan organisasi terkait dalam menyusun strategi kontra-narasi yang efektif untuk melawan propaganda dan disinformasi yang dilakukan oleh OPM.
4. Mendorong kerja sama internasional dalam menangani isu perang informasi di tingkat global, terutama melalui diplomasi dan penguatan kerangka hukum internasional.

Kerangka Teoritis

Konsep Peperangan Asimetris

Menurut Buffaloe (2006), peperangan asimetris adalah bentuk perang non-tradisional yang berpusat pada populasi dan melibatkan konflik antara kekuatan militer yang superior dan satu atau lebih kekuatan inferior. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti evaluasi dan penanganan ancaman asimetris, pelaksanaan operasi asimetris, pemahaman terhadap perbedaan budaya (cultural asymmetry), dan evaluasi biaya asimetris. Peperangan asimetris berfokus pada dinamika konflik antara pihak dengan kekuatan dan sumber daya yang tidak seimbang, di mana pihak yang lebih kuat, seperti negara atau lembaga keamanan, menghadapi tantangan dari pihak yang lebih lemah, seperti kelompok teroris. Teori ini juga menjelaskan strategi dan taktik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih lemah untuk mencapai tujuan mereka meskipun memiliki keterbatasan sumber daya. Perang asimetris didefinisikan sebagai konflik di mana aktor yang lebih kecil menggunakan metode non-konvensional untuk melawan aktor yang lebih besar.

Teori Propaganda

Propaganda adalah upaya sistematis untuk memengaruhi opini, sikap, atau tindakan masyarakat melalui penyampaian informasi yang selektif dan manipulatif. Menurut Lasswell (1927), propaganda adalah "pengendalian sikap publik melalui manipulasi simbol-simbol signifikan." Dalam pandangan Lasswell, propaganda bertujuan untuk memengaruhi audiens secara psikologis dengan memanfaatkan emosi, rasa takut, atau aspirasi mereka. Propaganda tidak hanya berfokus pada penyampaian fakta, tetapi juga pada pembingkai narasi untuk mencapai hasil tertentu. Ellul (1965) memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa propaganda adalah alat yang terintegrasi dalam masyarakat modern, di mana media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan propaganda. Ia mengklasifikasikan propaganda menjadi dua jenis utama: propaganda horizontal, yang dilakukan antarindividu dalam suatu komunitas, dan propaganda vertikal, yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah terhadap masyarakat. Ellul juga menyoroti bahwa propaganda modern sering kali menggunakan teknologi untuk mencapai audiens yang lebih luas secara efisien. Sementara itu, Jowett dan O'Donnell (2012) menguraikan propaganda sebagai "upaya sadar dan terencana untuk membentuk persepsi, memanipulasi kognisi, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai respons yang diinginkan oleh propagandis." Teori mereka menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sosial dalam keberhasilan propaganda. Mereka juga menyoroti bahwa propaganda dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti kampanye kesehatan masyarakat, maupun tujuan negatif, seperti manipulasi politik. Dalam konteks perang asimetris, propaganda sering digunakan oleh aktor non-negara untuk menciptakan polarisasi sosial, membangun dukungan internasional, atau melemahkan legitimasi pihak yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, propaganda dapat disebarkan secara cepat dan mencapai audiens global, menciptakan tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Creswell (2018) penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok kepada masalah sosial atau manusia. Penelitian ini melibatkan proses pengumpulan data yang beragam, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Creswell (2018) mendefinisikan studi kasus sebagai pendekatan penelitian kualitatif di mana

peneliti menyelidiki sebuah kasus atau beberapa kasus dalam satu waktu tertentu secara mendalam dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen, atau laporan visual. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan laporan media untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi pola-pola strategi perang informasi yang digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara taktik yang digunakan OPM dalam perang informasi dan efeknya terhadap legitimasi pemerintah serta polarisasi sosial di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Perang Informasi OPM

Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana utama dalam menyebarkan propaganda yang menyoroti isu ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan seruan kemerdekaan Papua. Melalui konten yang dikemas secara emosional dan naratif, OPM berupaya membangun simpati serta dukungan dari masyarakat domestik dan internasional. Strategi ini sejalan dengan fenomena global di mana aktor non-negara menggunakan media digital untuk memobilisasi dukungan dan mempengaruhi opini publik (Waskita & Sidik, 2023). Dalam upaya memperluas jangkauan pesan mereka, OPM memproduksi berbagai materi seperti video, artikel, dan gambar yang menggambarkan penderitaan masyarakat Papua. Konten-konten ini sering kali viral di media sosial, memanfaatkan algoritma platform yang cenderung mempromosikan konten dengan interaksi tinggi. Dengan demikian, pesan-pesan OPM dapat tersebar luas dalam waktu singkat, meningkatkan visibilitas isu Papua di mata dunia (Waskita & Sidik, 2023). Selain propaganda, OPM juga terlibat dalam penyebaran disinformasi, yaitu informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebarluaskan untuk menciptakan kebingungan dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia. Taktik ini bertujuan untuk melemahkan legitimasi pemerintah dan memperkuat narasi perjuangan mereka. Disinformasi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik, sebagaimana terlihat dalam berbagai konflik di era digital saat ini (Darmono, 2010).

Penyebaran disinformasi oleh OPM sering kali memanfaatkan isu-isu sensitif, seperti tuduhan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Informasi yang tidak diverifikasi ini dapat memicu reaksi emosional dari publik, baik di dalam maupun luar negeri, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana disinformasi dapat menjadi alat efektif dalam perang informasi untuk mencapai tujuan politik tertentu (Darmono, 2010). Strategi perang informasi yang dilakukan oleh OPM menuntut respons yang komprehensif dari pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat agar publik mampu membedakan antara informasi yang valid dan disinformasi. Selain itu, penguatan regulasi terkait penyebaran informasi di media digital menjadi krusial untuk mencegah meluasnya propaganda dan disinformasi yang dapat mengancam stabilitas nasional (Vinchha & Satrio, 2024). Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil juga penting dalam upaya menangkal propaganda dan disinformasi. Dengan bekerja sama, ketiga pihak ini dapat mengidentifikasi dan menindak akun-akun yang terlibat dalam penyebaran informasi menyesatkan, serta mempromosikan konten yang akurat dan dapat dipercaya. Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara untuk menghadapi tantangan serupa dalam perang informasi (Vinchha & Satrio, 2024).

Peningkatan kapasitas intelijen dalam mendeteksi dan menganalisis pola penyebaran propaganda dan disinformasi oleh OPM menjadi langkah penting. Dengan pemahaman yang

mendalam mengenai strategi yang digunakan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Peran intelijen dalam perang informasi mencakup pengumpulan data, analisis, dan penyusunan strategi counter-intelligence (Suharyanto, 2012). Secara keseluruhan, dinamika perang asimetris melalui strategi perang informasi yang dilakukan oleh OPM menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan stabilitas keamanan nasional dapat terjaga, serta integritas dan kedaulatan negara tetap terpelihara (Suharyanto, 2012).

Dampak terhadap Keamanan Nasional

Strategi perang informasi yang diterapkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah memberikan dampak signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia, terutama melalui polarisasi sosial di masyarakat. Narasi yang disebarluaskan oleh OPM, seperti tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan, memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap gerakan tersebut. Polarisasi ini mengancam kohesi sosial dan dapat menimbulkan konflik horizontal di berbagai daerah (Harini, 2024). Penyebaran disinformasi oleh OPM juga berkontribusi pada meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Informasi palsu yang disebar melalui media sosial menciptakan persepsi negatif terhadap institusi negara, sehingga melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi dapat memperburuk polarisasi politik dan sosial (Febrianda, 2024). Di kancah internasional, disinformasi yang disebar oleh OPM berhasil membentuk opini negatif terhadap pemerintah Indonesia. Narasi pelanggaran HAM dan penindasan yang dipublikasikan secara luas menurunkan citra Indonesia di mata dunia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Studi menunjukkan bahwa disinformasi dapat mengancam ketahanan nasional dengan mempengaruhi persepsi global terhadap suatu negara (Sarjito, 2024).

Polarisasi sosial yang dipicu oleh propaganda OPM menyebabkan fragmentasi di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling bertentangan, yang dapat menghambat proses dialog dan rekonsiliasi. Kondisi ini diperparah oleh penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan disinformasi, yang mempercepat penyebaran informasi palsu dan memperdalam perpecahan sosial (Fatih, 2024). Delegitimasi pemerintah akibat disinformasi OPM juga berdampak pada stabilitas politik dalam negeri. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dapat memicu protes dan gerakan oposisi yang lebih kuat, yang pada akhirnya mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Fenomena ini menunjukkan bagaimana disinformasi dapat menjadi alat efektif dalam melemahkan otoritas pemerintah (Ayu, 2024). Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan kemampuan untuk mengenali dan memverifikasi informasi, masyarakat dapat menjadi lebih tangguh terhadap propaganda dan disinformasi. Peningkatan literasi digital telah diidentifikasi sebagai langkah penting dalam mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ketahanan nasional (Sarjito, 2024). Pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan platform media sosial untuk memantau dan menindak akun-akun yang menyebarkan disinformasi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa ruang digital tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan keamanan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan platform digital dapat membantu mengendalikan penyebaran konten yang menyesatkan (Madani Indonesia, 2022). Secara keseluruhan, dampak strategi perang informasi OPM terhadap keamanan nasional Indonesia sangat kompleks dan memerlukan respons yang komprehensif. Upaya mitigasi harus

mencakup peningkatan literasi digital, penegakan hukum terhadap penyebar disinformasi, dan penguatan kohesi sosial di masyarakat. Dengan demikian, stabilitas keamanan nasional dapat terjaga di tengah tantangan perang informasi di era digital.

Respons Pemerintah

Dalam menghadapi propaganda yang disebar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi kontra-narasi melalui kampanye informasi yang bertujuan untuk menetralkan dampak negatif dari propaganda tersebut. Langkah ini mencakup penyebaran informasi yang akurat mengenai situasi di Papua, termasuk upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, pemerintah berupaya membangun kepercayaan publik dan mengurangi pengaruh narasi yang disebarluaskan oleh OPM (Fadhil, 2018). Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat sebagai bagian dari strategi kontra-narasi. Melalui program-program edukasi, masyarakat diajak untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan. Peningkatan literasi digital dianggap sebagai langkah penting dalam membentengi masyarakat dari dampak negatif disinformasi (Media Hukum, 2024). Di sisi lain, pemerintah telah memperkuat regulasi digital untuk memonitor dan mengatasi penyebaran konten bermasalah di media sosial. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait, pemerintah menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai penggunaan media digital. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban di ruang digital dan mencegah penyebaran konten yang dapat mengancam keamanan nasional (Media Hukum, 2024).

Implementasi regulasi tersebut melibatkan pemantauan aktif terhadap aktivitas di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan dalam mengawasi dan menindak akun-akun yang terlibat dalam penyebaran konten ilegal atau berbahaya. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran propaganda dan disinformasi yang dilakukan oleh kelompok seperti OPM (Media Hukum, 2024). Namun, upaya penguatan regulasi digital ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa penerapan regulasi yang ketat dapat membatasi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara (Prima & Kamaluddin, 2024). Selain regulasi, pemerintah juga mendorong platform media sosial untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola konten yang beredar di platform mereka. Kerjasama antara pemerintah dan penyedia platform menjadi kunci dalam memastikan bahwa konten yang melanggar hukum dapat segera ditangani tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi pengguna (Prasty, 2023). Upaya pemerintah dalam menangkalkan propaganda OPM melalui kontra-narasi dan penguatan regulasi digital menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Namun, efektivitas langkah-langkah ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dan menjaga integritas informasi di ruang digital (Fadhil, 2018). Secara keseluruhan, respons pemerintah terhadap strategi perang informasi OPM mencerminkan pendekatan yang komprehensif, mencakup edukasi publik, penegakan hukum, dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini diharapkan dapat meredakan dampak negatif propaganda dan disinformasi, serta memperkuat ketahanan nasional di era digital (Fadhil, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa strategi perang informasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bagian dari dinamika perang asimetris yang kompleks, dengan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia. OPM memanfaatkan propaganda dan disinformasi untuk menciptakan polarisasi sosial, delegitimasi pemerintah, dan membangun simpati internasional terhadap agenda separatis mereka. Media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan narasi ini, memungkinkan jangkauan yang luas dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi. Dampak dari strategi ini meliputi meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, polarisasi sosial yang memperdalam konflik horizontal, serta penurunan citra Indonesia di kancah internasional. Selain itu, narasi pelanggaran hak asasi manusia yang disebarluaskan oleh OPM berhasil membangun tekanan global terhadap pemerintah Indonesia, sehingga menciptakan tantangan diplomasi yang signifikan. Respons pemerintah, termasuk kampanye kontra-narasi, penguatan regulasi digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat, telah menunjukkan upaya mitigasi yang terkoordinasi. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan teknologi keamanan siber, serta kerja sama internasional untuk menangkal narasi separatis di forum global. Kesimpulannya, perang informasi oleh OPM tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Untuk menjaga stabilitas nasional, diperlukan strategi yang terintegrasi, inovatif, dan berbasis teknologi, serta upaya kolektif dalam membangun literasi digital dan memperkuat regulasi di era informasi yang dinamis.

Saran dan Rekomendasi

1. Peningkatan Literasi Digital. Pemerintah perlu memperluas program literasi digital untuk membantu masyarakat mengenali disinformasi dan propaganda, terutama melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan media.
2. Penguatan Regulasi Digital. Pemerintah harus memperbarui regulasi digital, seperti UU ITE, agar lebih efektif menangani penyebaran disinformasi tanpa melanggar kebebasan berekspresi.
3. Pengembangan Teknologi Keamanan Siber. Investasi dalam teknologi kecerdasan buatan dan analitik big data diperlukan untuk mendeteksi dan menangkal ancaman informasi secara real-time.
4. Kolaborasi Lintas Sektor. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi dan menindak akun yang menyebarkan disinformasi.
5. Penyelesaian Masalah Papua yang Inklusif. Pemerintah harus fokus pada pendekatan berbasis komunitas untuk mengatasi akar permasalahan di Papua, dengan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2023). *Human Rights in Papua: A Global Perspective*. Amnesty International.
- Ayu, B. (2024). Hoaks dan Disinformasi, Ancaman terhadap Demokrasi Digital Indonesia. *Kompasiana*.
- Buffaloe, David L. (2006). "Defining Asymmetric Warfare. The Institute Land Warfare" Papers (AUSA).
- Castells, M. (2023). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darmono, B. (2010). *Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional, 15(1).
- Ellul, J. (1965). *Propaganda: The formation of men's attitudes*. Knopf.
- Fadhil, Haris. (2018). Komisi I Minta Pemerintah Tangkal Propaganda OPM. https://news.detik.com/berita/d-3943925/komisi-i-minta-pemerintah-tangkal-propaganda-opm?utm_source=chatgpt.com
- Fatih, Ismail Zaky Al. (2024). Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 4(7).
- Febrianda, C. H. (2024). Dampak Hoax dan Disinformasi Terhadap Polarisasi Politik di Era Digital Menjelang Pemilu 2024. *Kompasiana*.
- Harini. (2024). Dampak Politik dan Sosial Organisasi Papua Merdeka terhadap Masyarakat Papua. *QuestionAI*.
- Hassan, R. (2022). *Digital Warfare and Propaganda: The New Frontlines*. Routledge.
- Jones, A. (2023). *Conflict Narratives in the Digital Age*. Oxford University Press.
- Jowett, G. S., & O'Donnell, V. (2012). *Propaganda and persuasion* (5th ed.). SAGE Publications.
- Kaldor, M. (2022). *New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era*. Polity Press.
- Lasswell, H. D. (1927). *Propaganda technique in the World War*. MIT Press.
- Luhulima, C. (2023). *Hukum Internasional dan Kedaulatan Negara*. Universitas Indonesia Press.
- Madani Indonesia. (2022). Digitalisasi: Mengatasi Disinformasi dan Melindungi Ruang Sipil di Media Digital. *Madani Indonesia*.
- Media Hukum. (2024). Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Sosial Media. https://www.hukum.or.id/2024/07/undang-undang-yang-mengatur-tentang-sosial-media.html?utm_source=chatgpt.com
- Mulyana, D. (2023). "Ketegangan Sosial di Papua: Sebuah Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(2), 123-136.
- Newman, D. (2022). *Asymmetric Warfare: Strategies and Challenges*. Springer.
- Nugroho, T. (2023). "Peran Media dalam Konflik Papua: Antara Propaganda dan Realitas." *Media Studies Journal*, 18(3), 221-240.
- Prastya Dicky. (2023). Revisi UU ITE Harus Paksa Media Sosial Transparan soal Konten Ilegal. https://www.suara.com/teknologi/2023/08/24/161121/revisi-uu-ite-harus-paksa-media-sosial-transparan-soal-konten-ilegal?utm_source=chatgpt.com
- Prima, Jaka., & Moh Kamaluddin. (2024). Hukum Tata Negara Dan Pengaturan Media Sosial: Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan Ketertiban. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. 3(6).
- Rahman, F. (2023). *Geopolitics and Separatist Movements in Southeast Asia*. Routledge.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2).
- Smith, J. (2021). *Non-State Actors in Asymmetric Warfare*. Cambridge University Press.
- Suharyanto, S. (2012). *Optimalisasi Satuan Kontra Intelijen Untuk Penanggulangan Aksi Terorisme*. Jurnal Ketahanan Nasional, 17(3).
- Taylor, L. (2022). *Fake News and Deepfake: The Weaponization of Information*. Palgrave Macmillan.
- Vincha, C., & Satrio, J. (2024). *Kemunculan Ancaman Siber Teknologi 5G dan Implikasinya terhadap Ketahanan Siber di Jakarta*. Jurnal Ketahanan Nasional, 30(2).

- Waskita, A. S., & Sidik, H. (2023). *Diplomasi Siber Indonesia dalam Penyelenggaraan Capacity Building on National Cybersecurity Strategy Workshop 2019*. Padjadjaran Journal of International Relations, 5(2).
- Widodo, J. (2023). "Ketimpangan Pembangunan di Papua: Sebuah Tinjauan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 45-60.
- Yudhoyono, S. (2022). "Tantangan Keamanan Nasional di Era Digital." *Jurnal Keamanan Nasional*, 12(4), 307-319.